

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Mis Yunus dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2017. *Hukum perizinan dalam skor pelayanan publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Alam Setia Zain. 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- A.M Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Edisi 2. Prenadamedia Group. Jakarta Timur.
- A. M. Yunus Wahid. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- A. Gunawan Setiardja. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat*. Kanisius. Yogyakarta.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Phinatama Media. Cetakan Pertama.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Setara Press. Jakarta Timur. Hlm. 8-9.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Edisi 2 Cetakan 4. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Hukum Tata Negara*. Penerbit Andi. Edisi Revisi. Jakarta
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

- Markum. 2015. *Hutan Kemasyarakatan*. RA Visindo. Mataram.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Adinistrasi Negara*. Edisi Revisi. Cet. 12. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Salim H.S. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- S Prajudi Atsmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sondang.P Siagian. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suwarno Handayaniingrat. 1996. *Pengantar ilmu Administrasi dan Manajemen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sondang P. Siagian. 1986. *Filsafat Administrasi. Gunung Agung*. Jakarta.
- Sujamto. 1987. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Situmorang Victor M. 1998. *aspek pengawasan melekat dalam lingkup aparatur pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.

#### **Jurnal, Artikel, Skripsi, Karya Ilmiah**

- Adam Dwiki. 2016. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Enrekang Di Bidang Kehutanan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Dian Kagungan. 2012. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal Publica*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 2 No.1.
- Feni Rosalia dan Yuni Ratnasari. 2016. Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010. *Jurnal Sosiohumaniora*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Vol 18 No. 1.
- Fadhila Shaffa Luthfie & Irvan Zaldya. 2020. Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat Pemberi Izin terhadap Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. *Padjajaran Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Vol 8 No. 2.

- Fandy Sondakh. 2019. Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Pembangunan Sarana Telekomunikasi. *Jurnal Politico*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Vol 8 No 2.
- Grace Sharon. 2021. Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*. Fakultas Hukum. Universitas Krisnadwipayana Jakarta. Vol 3
- Hamdan Zainuddin dan Arief Rahman. 2021. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Desa Sapit Kabupaten Lombok Timur.. *Jurnal Private Law*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Volume 1, Issue 3
- Muhammad Nur Nonci. 2009. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Jeneponto. Tesis. Program Studi Sistem-Sistem Pertanian. Konsentrasi Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Pertanian. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Muhammad Zulfan Hakim. 2017. Izin Sebagai Instrument Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Hukum Islah*. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Artikel Cendekia. Vol 29.
- Novita Sumule. 2019. Pengawasan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu Di Toraja Utara. Skripsi. Program Studi Hukum Administrasi Negara. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Renalthy Lidwina Diaz, Wilhelmina Seran, Norman P.L.B.Riwu Kaho. 2022. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan Pola Agroforestry Di Desa Rana Kalong Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Wana Lestari*. Volume 06, Nomor 01
- Subarudi, Ngaloken Gintings, dan Suwardi Sumadiwangsa. 2005. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung: Kemungkinan Penyadapan Getah Pinus Di Hutan Lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*.
- Siti Ikramatoun, Khairulyadi, Riduan. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Pinus di Kecamatan Linge Aceh Tengah. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*. Program Studi Sosiologi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Vol.1.
- Syahrizal. 2015. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dengan Pola Agroforestry di Desa Amal Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala. *Jurnal Sains dan Teknologi Tadulako*. Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako. Vol 4 No 1.

Trivena. 2019. Pengusahaan Getah Pinus Pola Kemitraan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mamasa Tengah Provinsi Sulawesi Barat. Tesis. Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanuddin. Makassar.

RPHJP KPHL Mata Allo Kab. Enrekang Sulawesi Selatan

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Menteri Kehutanan RI No.P-88/Menhut-II/2014

Peraturan Menteri dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial

Peaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial Tata cara permohonan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kayu Pada Hutan Hak/Hutan Rakyat Dalam Kabupaten Enrekang.

Standar Operasional Prosedur Penyardapan Getah Pinus dengan Nomor : SOP.1/JASLING/UHHBK/HPL.2/1/2020 Tentang Sistem Evaluasi Pneyadapan Getah Pinus Pada Pemegang Izin dan Kerjasama Kesatuan Pengelolaan Hutan

## Internet

<https://bloghariyanto.blogspot.com/2010/05/hutan-kemasyarakatan-hkm.html?m=1> diakses pada tanggal 22 April 2022.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>. diakses pada tanggal 22 April 2022.

<https://www.scribd.com/doc/66370233/Pola-Hubungan-Antara-Pusat-Dan-Daerah-UNPAD>, diakses 20 April 2022.

[23 \(balithutmakassar.org\)](http://23.balithutmakassar.org) diakses pada tanggal 22 April 2022.

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Enrekang. 2010.hal.12

## Wawancara

Devi Akriany, Wawancara, UPT KPH Mata Allo, Kabupaten Enrekang, 20 Mei 2022

Muchlis, Wawancara, UPT KPH Mata Allo, Kabupaten Enrekang, 20 Mei 2022

Syamsul Bahri, Wawancara, UPT KPH Mata Allo, Kabupaten Enrekang, 7 November 2022

Muhammad Saad, Wawancara, Pemegang Izin HKm, Desa Sanglepongan, 14 November 2022

Arik, Wawancara, Penyadap, Desa Sanglepongan, 14 November 2022

Muhammad Syukri, Wawancara, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi-Selatan, 17 Januari 2023